

Expenditure Siswa SMAN Berdasarkan Geoekonomi

Sunarni

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

jengnarni@yahoo.co.id

Abstract: The research aims to know the component of the expenditure of public senior high school student based on geoeconomy in East Java Province, to know the amount of the expenditure of public senior high school student in a year, and to know whether the difference on the expenditure of public senior high school student based on geoeconomy really exists. The applied design was quantitative design with comparative descriptive analysis technique. The data collection was carried out with the questionnaire technique. Education costing components include direct and indirect costs. It is estimated that a student spends ± Rp 10,940,000.00 per year. There is significant difference on the expenditure of public senior high school student based on geoeconomy in East Java Province. The highest education cost that must be paid by students can be found in Gresik, Batu, Surabaya, and last in Banyuwangi.

Keywords: expenditure, Public Senior High School student, geoeconomy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komponen *expenditure* siswa SMAN berdasarkan geoekonomi di Provinsi Jawa Timur, mendeskripsikan besarnya *expenditure* siswa SMAN per tahun, dan mengetahui adanya perbedaan *expenditure* siswa SMAN berdasarkan geoekonomi. Rancangan yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif komparatif. Pengumpulan data dengan teknik kuesioner. Banyak komponen pembiayaan pendidikan yang terdiri biaya langsung dan tak langsung. Siswa mengeluarkan biaya ± Rp 10.940.000,00/tahun. Ada perbedaan yang signifikan *expenditure* siswa SMAN berdasarkan geoekonomi di Provinsi Jawa Timur. Biaya pendidikan paling tinggi ditanggung siswa di wilayah Gresik, wilayah Batu, wilayah Surabaya, yang terakhir wilayah Banyuwangi.

Kata Kunci : *expenditure*, siswa SMA, geoekonomi

Biaya pendidikan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Setiap tahun ajaran baru muncul keresahan pada diri setiap orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Keresahan itu antara lain (1) jika anaknya tidak mendapat tempat di sekolah, (2) jika anaknya tidak diterima di sekolah pilihannya, (3) jika ada pungutan-pungutan lagi oleh sekolah sehingga menambah beban orang tua, (4) jika anaknya tidak dapat meneruskan sekolah/*drop out* karena biaya mahal (Sumardi, 1982). Ada bermacam-macam kebutuhan hidup yang harus dikeluarkan oleh sebuah keluarga antara lain kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan quarter. Mahalnya biaya pendidikan mengindikasikan (1) masyarakat kurang mampu (perekonomian buruk), (2) pendidikan dianggap sebagai bisnis komersial dan bukan sebagai alat mencerdaskan bangsa, (3) pemerintah kurang serius memperhatikan pendidikan, (4) dana pendidikan banyak dikorupsi bukan digunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar (Dikdasmen Depdiknas,

2006:1).

Ada beberapa sumber biaya pendidikan pada tingkat sekolah, antara lain pemerintah baik pusat maupun daerah, keluarga siswa, dan sumbangan masyarakat. Dalam pembiayaan pendidikan ada perbedaan pendapat yang menyatakan biaya lebih banyak ditanggung orang tua siswa dari pada pemerintah, sedangkan yang lain berpendapat pemerintah lebih banyak menanggung biaya pendidikan dari pada orang tua. Kompas (2004) menyatakan biaya pendidikan yang ditanggung orang tua siswa sebanyak 53,74-73,87%, sedangkan pemerintah dan masyarakat selain orang tua siswa sebesar 26,13-46,26% dari biaya pendidikan total. Hal yang sebaliknya temuan dari Fattah (2002) menyatakan bahwa jumlah anggaran dari pemerintah pusat sebesar 90,73%, BP3 6,88%, pemerintah daerah 2,17%, dan masyarakat 0,40%, berarti ada perbedaan yang berarti, yaitu pemerintah lebih banyak menanggung biaya pendidikan daripada

masyarakat maupun orang tua.

Besar biaya pendidikan per siswa/tahun di sekolah/masdrasah negeri adalah: Sekolah Dasar (SD) Rp 1,864 juta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Rp 1,960 juta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 2,771 juta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rp 2,246 juta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp 3,612 juta, MA (Madrasah Aliyah) Rp 2,673 juta, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rp 4,737 juta dengan mengalikan jumlah siswa di masing-masing sekolah/madrasah diperoleh angka Rp 70,317 triliun (Kompas, 2004). Surya (2004) menyatakan menurut perkiraan Departemen Pendidikan Nasional untuk terwujudnya pendidikan bermutu satuan biaya per siswa/tahun ialah untuk SD Rp 13.446.500,00; untuk SMP Rp 27.436.500,00; untuk SMA Rp 35.522.690,00; dan Rp 40 juta untuk SMK. Dari berbagai pendapat di atas sudah jelas bahwa biaya pendidikan itu sangat besar atau tidak mungkin murah apalagi gratis terutama bagi kalangan tidak mampu. Hasil desertasi Danumihardja (2004) menyatakan bahwa kondisi di SMP swasta dan negeri, apabila didukung biaya, sarana dan prasarana, serta guru yang kinerja baik akan memperoleh hasil yang baik pula. Teori *cost effectiveness* untuk sekolah swasta hampir seluruh biaya pendidikan dibiayai orang tua siswa. Ada kecenderungan adanya keterkaitan antara level biaya dengan mutu lulusan, yaitu semakin tinggi satuan biaya per siswa, maka hasil Nilai Ebtanas Murni (NEM) makin tinggi/baik. Temuan Fattah (2002) menyatakan bahwa jumlah biaya operasional pendidikan SD perkotaan dan pedesaan yang bersumber dari pemerintah pusat sangat berbeda cukup besar, yaitu 64,75% berbanding 35,25% dan yang bersumber dari BP3 88,10% berbanding 11,90%.

Permasalahan tentang mahalny pendidikan, diperlukan pemberdayaan seluruh rakyat dan pemerintah untuk lebih konsen terhadap pendidikan, dan berusaha menciptakan pendidikan berkualitas yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, meminimalkan biaya pendidikan untuk hasil yang maksimal. Semua ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan bersama. Keputusan akan otonomi daerah yang berimbang pada pendidikan harus diperhatikan secara lebih serius dan cermat agar semua warga negara usia sekolah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.

Walaupun sudah ada usaha pemerintah untuk membantu biaya bagi anak yang tidak mampu, tetapi

masih ada anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah, karena masih banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pribadi/keluarga. Kompas (2005) menyatakan kemiskinan dan putus sekolah dapat dianggap sebagai dua sisi dari satu mata uang. Kemiskinan yang mendera sebagian besar keluarga kurang mampu menyebabkan mereka tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya secara optimal. Akibatnya, putus sekolah menjadi pilihan. Akses untuk memperoleh kesempatan pendidikan menjadi begitu terhambat. Kemiskinan merupakan hambatan terbesar bagi anak-anak dalam mengenyam pendidikan di sekolah meski sudah ada kemudahan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk tidak membayar Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP), tetapi masalahnya bukan hanya membayar SPP masih ada biaya yang harus dikeluarkan orang tua yang tidak mampu. Keperluan itu seperti membeli seragam sekolah, buku pelajaran, atau biaya transportasi anak ke sekolah. Belum lagi biaya lain yang kadang membuat anak dari kalangan tidak mampu menjadi tersisihkan dari interaksi sosialnya di sekolah. Dampaknya, anak-anak dari keluarga miskin sering malas datang ke sekolah dan akhirnya putus sekolah menjadi tidak terelakkan.

Mahalny pendidikan masih dirasakan oleh siswa yang duduk di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang merupakan program wajib belajar 9 tahun yang masih diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah. Pada jenjang SMA yang terlepas dari program wajib belajar, apalagi jika sekolah yang bersangkutan disebut sekolah favorit, maka biaya pendidikan juga semakin mahal.

Selain biaya atas bantuan pemerintah, orangtua/wali murid mengeluarkan biaya yang lain, seperti siswa SMA sudah mempunyai mobilitas yang lebih tinggi dari pada siswa SD dan SMP. Siswa yang semula diantar orang tua, jalan kaki, naik sepeda, setelah masuk SMA sudah membawa sepeda motor bahkan mobil sendiri. Siswa yang semula tidak mengeluarkan biaya kost, setelah masuk ke SMA harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk kost. Siswa yang semula tidak menyukai bepergian dengan teman-teman sebaya, setelah masuk SMA sudah mulai menyukai kegiatan ini, dan lain sebagainya. Hal ini menambah pengeluaran biaya orang tua.

Sekolah harus mengeluarkan biaya yang sangat besar demi membiayai pengeluaran yang besar pula untuk meraih mutu yang terbaik bagi anak didiknya. Ada kemungkinan biaya pendidikan gratis, sekedar SPP-nya. Persoalan biaya yang lain-lain misalnya

untuk membeli tas sekolah, buku-buku pelajaran, seragam sekolah, biaya iuran bulanan, sumbangan, uang ujian, dan lain-lain, masih ditanggung oleh orang tua siswa (belum digratiskan). Dan biaya lain-lain ini mempunyai jumlah jauh lebih besar dari biaya SPP tiap bulan (Supriyadi, 2000).

Pendidikan mahal tidak hanya dirasakan oleh masyarakat miskin yang biasa menghuni di wilayah pedesaan, tetapi juga dapat dipandang dari sudut geografi ekonomi (geoekonomi)/aktivitas penduduk seperti penduduk yang mempunyai pekerjaan bertani (agraris) mungkin akan berbeda dengan masyarakat yang sebagian besar hidup di daerah industri, perdagangan, atau daerah pantai. Dari segi aktivitas penduduk, nilai uang sangat mempengaruhi cara hidup seseorang atau penduduk.

Studi tentang pembiayaan pendidikan (*household expenditure*) yang berbasis dana masyarakat dan keluarga di tingkat sekolah belum banyak dilakukan, sementara pemerintah mengundang masyarakat/keluarga untuk berperanserta lebih besar dalam pembiayaan pendidikan, tanpa pengetahuan yang cukup berapa besar mereka telah memberikan kontribusi. Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana untuk Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMA mengalami kenaikan dari tahun 1999 hingga tahun 2001, yaitu dari tahun 1998/1999 adalah Rp 481.541.122,00 menjadi Rp 523.394.123,00 (naik 8,69%) pada tahun 1999/2000. Tahun 2000/2001 menjadi Rp 640.903.233,00 (naik 22,45%). Sumber dana RAPBS SMA di Provinsi Jawa Timur tahun 2000/2001 dana dari pemerintah 74,5%, siswa 23,4%, dan lain-lain 2,1% (Supriyadi, 2004). Dari dana yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan membantu siswa yang kurang mampu.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang besarnya biaya pendidikan (*expenditure*) yang harus dikeluarkan siswa untuk menempuh studi di SMA Negeri ditinjau dari segi geoekonomi, terutama di Provinsi Jawa Timur. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) apa sajakah komponen pembiayaan pendidikan siswa SMAN berdasarkan geografi ekonomi di Provinsi Jawa Timur, (2) berapa besarnya pembiayaan pendidikan siswa SMAN per tahun di provinsi Jawa Timur, Dan (3) adakah perbedaan pembiayaan pendidikan siswa SMAN berdasarkan geografi ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif komparatif. Teknik statistik deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan pembiayaan pendidikan yang bersifat langsung, tidak langsung, dan gabungan dari biaya langsung dan tak langsung, yaitu biaya pendidikan (*expenditure*). Penelitian ini juga akan membandingkan antara biaya langsung, biaya tak langsung, dan biaya pendidikan dari suatu kelompok, yaitu wilayah agraris (pertanian, perkebunan dan hutan) diwakili Kota Batu, wilayah pantai/perikanan diwakili Kabupaten Banyuwangi, wilayah perdagangan diwakili Kabupaten Gresik, dan wilayah industri diwakili Kota Surabaya. Alat pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMAN di Provinsi Jawa Timur, yang mewakili masing-masing wilayah geografi ekonomi yang berjumlah 43 SMAN dengan 34.418 siswa. Penarikan Sampel menggunakan teknik *cluster proportional random sampling*. Sampel sekolah 23 sekolah masing-masing diambil lokasi kota, tengah, dan pinggiran. Jumlah sampel 379 siswa diambil berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan. Kota Batu 2 sekolah dengan 17 siswa, Kabupaten Banyuwangi 7 sekolah dengan 84 siswa, Kabupaten Gresik 3 sekolah dengan 63 siswa, serta Kota Surabaya 11 sekolah dengan 215 siswa. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan statistik parametris, yaitu analisis komparatif (Anova Satu Jalur/*One Way Anova*). Analisis data baik deskriptif maupun komparatif menggunakan program *SPPS For Windows*.

HASIL

Komponen biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pribadi/individu/keluarga untuk pendidikan (*household expenditure*) yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung terdiri atas biaya berikut (1) Biaya pokok pendidikan terdiri dari: pendaftaran ketika masuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), uang pangkal masuk sekolah/pembangunan gedung, daftar ulang pada waktu kenaikan kelas, SPP, biaya rutin, biaya praktikum, ujian teori, dan ujian praktik. (2) Biaya untuk membeli perlengkapan studi yang terdiri dari: biaya buku pelajaran/latihan/LKS, langganan majalah, sewa buku teks. (3) Biaya menyelesaikan tugas/PR: membeli kertas, biaya pengetikan, biaya

penjilidan, foto copy tugas/PR. (4) Biaya transportasi meliputi biaya pergi ke dan pulang dari sekolah. (5) Biaya wawasan ilmu: akses internet, kegiatan intra/ekstra sekolah, biaya kursus/les pelajaran/privat, remidi/mengulang matapelajaran yang nilai tidak baik. (6) Biaya kelulusan: uang wisuda, biaya pengambilan ijazah, dan legalitas. Biaya tak langsung terdiri atas: (1) biaya penginapan atau kost, (2) Biaya makan/minum/jajan, (3) biaya komunikasi yang terdiri dari: telepon/sms, surat menyurat, *chatting*, (4) biaya rekreasi yaitu tamasya kelas/*study tour*/refreshing, (5) biaya kesehatan yaitu biaya periksa ke dokter/beli obat/olah raga, (6) biaya perawatan tubuh yaitu membeli produk kosmetik (bedak/wewangian/hand body/sampo/brush/salon, dll), (7) biaya belanja yaitu membeli baju/tas/sepatu/aksesoris, (8) biaya lain-lain yang terdiri dari: menjenguk teman sakit, kado ultah, mengikuti bazar, membeli jam dan batu batrai, kencana, iuran mengikuti lomba, beli Compact Disc (CD) Game, musik, dan CD blank. Hal yang berhubungan dengan HP yaitu servis, beli kartu baru. Berhubungan dengan sepeda motor yang terdiri dari servis, membeli bensin, dan ban bocor. Berhubungan dengan lalu lintas: ketilang, kecelakaan, dan pembuatan SIM.

Biaya rata-rata per tahun yang dikeluarkan oleh individu/pribadi/keluarga siswa untuk biaya langsung ± Rp 7.726.667,00 dan biaya tak langsung ± Rp 3.213.333,00 sehingga dari biaya langsung ditambah tak langsung menjadi biaya pendidikan adalah sebesar ± Rp 10.940.000,00. Biaya siswa dalam menempuh pendidikan menengah dalam jangka waktu 3 tahun untuk biaya langsung ± Rp 23.180.000,00 dan biaya tak langsung ± Rp 9.640.000,00 sehingga dari biaya langsung ditambah biaya tak langsung menjadi biaya pendidikan (*expenditure*) adalah sebesar ± Rp 32.820.000,00.

Hasil analisis *Oneway Anova* tentang sub variabel biaya langsung pendidikan berdasarkan geoekonomi menunjukkan bahwa $F_{\text{ratio}} = 50,054$ dengan taraf signifikansi 0,000. Dengan kata lain ada perbedaan yang signifikan pembiayaan pendidikan langsung siswa SMAN berdasarkan geoekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis *Oneway Anova* tentang sub variabel biaya tak langsung pendidikan berdasarkan geoekonomi menunjukkan bahwa $F_{\text{ratio}} = 20,465$ dengan taraf signifikansi 0,000. Dengan kata lain ada perbedaan yang signifikan pembiayaan pendidikan tak langsung siswa SMAN berdasarkan geoekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dan hasil variabel biaya pendidikan (*expenditure*) berdasarkan geoekonomi menunjukkan bahwa $F_{\text{ratio}} = 50,865$

dengan taraf signifikansi 0,000. Dengan kata lain ada perbedaan yang signifikan pembiayaan pendidikan siswa SMAN berdasarkan geoekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Biaya langsung paling tinggi ditanggung siswa di wilayah Gresik, selanjutnya wilayah Batu, wilayah Surabaya, dan terakhir wilayah Banyuwangi. Biaya tak langsung paling tinggi ditanggung siswa di wilayah Surabaya, selanjutnya wilayah Gresik, wilayah Batu, dan terakhir wilayah Banyuwangi. Biaya pendidikan (*expenditure*) paling tinggi ditanggung siswa di wilayah Gresik, selanjutnya wilayah Batu, wilayah Surabaya, dan terakhir wilayah Banyuwangi.

PEMBAHASAN

Komponen Pembiayaan Pendidikan

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan sekolah menengah yang merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang merupakan program wajib belajar 9 tahun (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama). Pada taraf pendidikan dasar 9 tahun, sekarang ini pemerintah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Walaupun demikian, masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang perlu ditanggung oleh orang tua siswa setiap bulan/tri wulan/semester/setiap tahunnya. Banyak jenis pengeluaran (komponen biaya pendidikan) yang harus ditanggung oleh siswa SMAN. Cohn, Anwar, Gaffar, dan Thomas (dalam Supriyadi, 2004) yang menyatakan bahwa biaya pendidikan meliputi (a) biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar. Sedangkan biaya tidak langsung, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah.

Supriyadi (2004) menyatakan komponen pengeluaran keluarga siswa SMA untuk pendidikan per tahun/siswa meliputi: uang pangkal/uang masuk, iuran rutin sekolah (bulanan), ulangan/THB, kegiatan ekstra kurikuler, praktikum, buku pelajaran/latihan/LKS, buku dan alat tulis, tas sekolah, sepatu sekolah, transportasi ke sekolah, pakaian seragam sekolah, pakaian olah raga, les di sekolah oleh guru, kursus/les di luar sekolah, karyawisata (*study tour*), sumbangan insidental, uang saku/jajan siswa, biaya lainnya. Supriyadi (2000) menyatakan sekolah harus mengeluarkan biaya yang sangat besar demi membiayai pengeluaran yang besar pula untuk

meraih mutu yang terbaik bagi anak didiknya. Ada kemungkinan biaya pendidikan gratis, tetapi sekedar SPP-nya. Persoalan biaya yang lain-lain, misalnya untuk membeli tas sekolah, buku-buku pelajaran, seragam sekolah, biaya iuran bulanan, sumbangan, uang ujian, dan lain-lain, masih ditanggung oleh orang tua siswa. Biaya lain-lain ini mempunyai jumlah jauh lebih besar dari biaya SPP tiap bulan.

Hal di atas diperkuat dengan pernyataan Bagong Suyanto (Jawa Pos, 2004) yang menyatakan bahwa biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan itu terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, uang jajan siswa, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*).

Biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga khusus kelas X (kelas 1 SMA) mencakup uang beli formulir, uang pangkal, uang seragam, dan pengeluaran untuk MOS (Masa Orientasi Siswa). Biaya untuk semua kelas (baik kelas X, XI, dan XII) mencakup daftar ulang, uang seragam, buku paket, buku penunjang, Lembar Kerja Siswa (LKS), fotokopi, alat peraga, iuran peringatan hari keagamaan, *camping*, uang les/tambahan pelajaran, pendalaman materi, ekstrakurikuler, ulangan umum bersama, *try out*, *study tour*, uang jajan, pensil warna, buku gambar besar, transportasi pergi dan pulang sekolah (Darmaningtyas, 2005).

Dari pendapat para ahli dan hasil temuan menyatakan bahwa untuk mendapatkan hasil pendidikan yang bermutu Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan orang tua. Biaya pendidikan tidak mungkin gratis, tetapi persoalannya siapa yang mengemban tanggung jawab biaya pendidikan. Bagi negara maju dan kaya, menggratiskan sekolah untuk orang tua siswa merupakan hal yang wajar dengan kata lain biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Walaupun ditanggung oleh pemerintah, ternyata ada pajak pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk membiayai pendidikan. Jadi secara tidak langsung masyarakat dan orang tua juga membiayai pendidikan, hanya saja jalur keuangan yang berbeda. Bagi negara yang sedang maju seperti Indonesia, belum menggratiskan biaya pendidikan karena persoalan dana yang belum mencukupi. Ada provinsi di Indonesia yang telah menggratiskan biaya SPP, tetapi hanya beberapa saja dan hasilnya masih dikaji ulang apakah diteruskan atau diberhentikan.

Pemerintah masih melibatkan masyarakat luas dan orang tua untuk membiayai pendidikan sebagai investasi bangsa di masa depan. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional BAB XIII tentang pendanaan pendidikan dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Besarnya Pembiayaan Pendidikan (*Expenditure*)

Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh siswa di jenjang pendidikan menengah (SMAN) di Jawa Timur berdasarkan geoekonomi tidaklah sedikit. Selain pemerintah, siswa harus mengeluarkan sejumlah uang untuk menyelesaikan pendidikan. Pengeluaran sejumlah uang mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang berjangka waktu 3 tahun sekali, 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, dan 1 bulan sekali. Jika biaya pendidikan dihitung rata-rata per tahun yang dikeluarkan oleh individu/pribadi/keluarga siswa SMAN, untuk biaya langsung ± Rp 7.726.667,00/tahun dan biaya tak langsung ± Rp 3.213.333,00/tahun, sehingga dari biaya langsung dan tak langsung (*expenditure*) sebesar ± Rp 10.940.000,00/tahun. Jika siswa menyelesaikan dalam waktu 3 tahun, maka dibutuhkan biaya langsung ± Rp 23.180.000,00/3 tahun dan biaya tak langsung ± Rp 9.640.000,00/3 tahun. Jumlah biaya langsung dan tak langsung (*expenditure*) sebesar ± Rp 32.820.000,00/3 tahun.

Kompas (2004) menyatakan biaya pendidikan yang ditanggung orangtua siswa 53,74-73,87%, sedangkan pemerintah dan masyarakat selain orang tua siswa sebesar 26,13-46,26% dari biaya pendidikan total. Hal yang sebaliknya temuan dari Fattah (2002:136-140) menyatakan bahwa jumlah anggaran dari pemerintah pusat 90,73%, BP3 6,88%, pemerintah daerah 2,17%, dan masyarakat 0,40%. Berarti ada perbedaan yang berarti pemerintah lebih banyak menanggung biaya pendidikan daripada masyarakat maupun orang tua. Perkiraan Depdiknas untuk terwujudnya pendidikan bermutu satuan biaya per siswa/tahun ialah untuk SD Rp 13.446.500,00, untuk SMP Rp 27.436.500,00, untuk SMA Rp 35.522.690,00, dan Rp 40 juta untuk SMK (Surya, 2004).

Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana untuk RAPBS SMU mengalami kenaikan dari tahun 1999 hingga tahun 2001 yaitu: dari tahun 1998/1999 adalah 481.541.122 menjadi 523.394.123 (naik

8,69%) pada tahun 1999/2000. Tahun 2000/2001 menjadi 640.903.233 (naik 22,45%). Sedangkan sumber dana RAPBS SMU di Provinsi Jawa Timur tahun 2000/2001 dana dari pemerintah 74,5%, siswa 23,4%, dan lain-lain 2,1% (Supriyadi, 2004). Dari perkiraan Depdiknas jika mewujudkan pendidikan bermutu untuk jenjang SMA Rp 35.522.690,00, sedangkan biaya yang ditanggung siswa/pribadi/orang tua siswa sebesar ± Rp 10.940.000,00 (31%), maka tanggung jawab pemerintah tinggal menambah 24.582.690,00 (69%). Dan hasil ini hampir sama dengan perbandingan sumber dana RAPBS di Provinsi Jawa Timur tahun 2000/2001 dari pemerintah 74,5% dan siswa 23,4%, lain-lain 2,1%. Biaya pendidikan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Burrup (1993) menyatakan kenaikan biaya pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor: kenaikan dan perubahan siswa yang mengikuti pendidikan, penambahan program dan penyediaan pelayanan misalnya literatur dengan program komputer dan teknologi, inflansi, dan jumlah dan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Perbedaan Biaya Pendidikan Berdasar Geoekonomi

Perbedaan dipandang dari sudut geoekonomi/aktivitas penduduk seperti penduduk yang mempunyai pekerjaan bertani (agraris) mungkin akan berbeda dengan masyarakat yang sebagian besar hidup di daerah industri, perdagangan, atau daerah pantai. Dari segi aktivitas penduduk, nilai uang sangat mempengaruhi cara hidup seseorang atau penduduk. Untuk biaya langsung dan biaya pendidikan ternyata Kota Batu yang digolongkan sebagai wilayah agraris siswa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari pada Kota Surabaya. Kota Surabaya mempunyai kekuatan APBD terbesar di Jawa Timur 2,2 triliun rupiah, dan telah dialokasikan untuk pendidikan dengan anggaran sebesar Rp 476.549.949.790,00. Sebuah angka yang sangat besar apalagi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur. Sebesar Rp 33.960.476.794,00 dialokasikan untuk program pendidikan menengah yang dikemukakan oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya dalam (Surya, 2007). Dengan dana pendidikan yang besar dari pemerintah, akan membantu/mengurangi siswa/masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Kota Batu yang digolongkan ke dalam agraris (pertanian, perkebunan, dan hutan), biaya langsung dan biaya pendidikan (*expenditure*) tinggi. Kota ini semula merupakan kota administratif bagian

dari wilayah Kabupaten Malang, selanjutnya berdiri sendiri menjadi Kota Batu. Dalam tahap perkembangannya Kota Batu ingin mengejar ketertinggalan dari Kota Malang dan Kabupaten Malang. Di wilayah Batu banyak bermunculan hotel-hotel, tempat pariwisata, dan pusat agrobisnis di Provinsi Jawa Timur. Pertanian di Kota Batu sudah berkembang agroindustri yang mengolah sumber daya tumbuhan dan hewan. Dengan demikian akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, dan pendapatan masyarakat akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

Biaya tak langsung (biaya hidup), Kota Surabaya menduduki peringkat pertama. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta dan merupakan pusat kota Provinsi Jawa Timur. Tidak dipungkiri lagi bahwa biaya hidup dimana pun kota itu berada, biaya hidup akan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah tengah atau pinggiran. Di perkotaan banyak dibangun mal-mal, supermarket, tempat rekreasi, dan tempat-tempat kebugaran/layanan kesehatan serta layanan masyarakat yang lengkap. Banyaknya tempat-tempat layanan masyarakat yang komplit dan gencarnya iklan, akan mempengaruhi masyarakat perkotaan untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan konsumsi. Reksohadiprodjo (1985) menyatakan bahwa kota merupakan konsentrasi kegiatan tidak saja ekonomis, melainkan juga politik, sosial, hukum, budaya dalam suatu tata ruang tertentu. Hubungan di dalamnya terjadi di dalam dan antar kota dan sifatnya unik. Berbagai faktor seperti pasaran tanah, kesempatan kerja, pasaran rumah, kenyataan adanya golongan pribumi dan nonpribumi, transportasi dan lalu lintas, perpajakan, dan keuangan menyebabkan adanya kemacetan dan polusi yang hebat

Di Kabupaten Banyuwangi, siswa mengeluarkan biaya paling rendah baik biaya langsung, tak langsung, dan biaya pendidikan. Sunny (2007) menyatakan bahwa kabupaten ini mempunyai angka kemiskinan relatif tinggi atau sekitar 28,75%. Hal ini dipengaruhi minimnya tamatan pendidikan formal. Data tahun 2006 lalu, penduduk Banyuwangi masih didominasi lulusan SD/MI yang mencapai 33,93%, lulusan SMP/ sederajat 17,09%, SMA 9,37%, SMK 5,15% dan Perguruan Tinggi hanya 1,56%. Sisanya, banyak yang belum tamat atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Engel (1987) menyatakan secara umum ada 3 katagori yang mendasari perilaku konsumen: (1) pengaruh lingkungan (budaya, kelas sosial, pribadi, keluarga, situasi), (2) perbedaan dan pengaruh

individu (sumber daya konsumen: waktu, uang, dan perhatian), motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian/gaya hidup dan demografi (jenis kelamin, pendapatan, dan usia), dan (3) proses psikologis (pengolahan informasi manusia, pembelajaran, dan perubahan sikap dan perilaku). Soediharto (2001) menyatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh (1) faktor pribadi yang dikategorikan menjadi faktor demografi (jenis kelamin, umur, pendapatan, daur hidup keluarga, dan pekerjaan), situasional (kondisi eksternal yang ada ketika konsumen membuat keputusan pembelian), dan tingkat keterlibatan, (2) faktor psikologis (motivasi, persepsi, sikap, kemampuan dan pengetahuan kepribadian, dan (3) faktor sosial (keluarga, kelompok referensi, kelas sosial, dan budaya). Dari dua pendapat ahli ini, perilaku konsumen untuk membelanjakan keuangan untuk biaya pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan/sosial, individu/pribadi, dan psikologis seseorang.

Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wakil dari wilayah pantai masih belum memahami betul manfaat pendidikan, terbukti masih minimnya lulusan pendidikan menengah dan tinggi. Seandainya sudah ada penduduk yang sudah paham, tetapi kemiskinan yang mendera di kalangan penduduk, menyebabkan enggan mereka untuk menyekolahkan putra-putrinya. Keengganan mereka disebabkan oleh hasil pendidikan yang tidak segera mereka nikmati, tetapi harus menunggu beberapa tahun kemudian. Selain itu, peredaran uang dan pola konsumsi yang berbeda dengan wilayah perdagangan dan wilayah perindustrian. Lingkungan yang tidak banyak menyediakan fasilitas, gaya hidup, pendapatan, sikap dan perilaku, situasi, dan motivasi yang berbeda dengan wilayah perdagangan dan perindustrian, menyebabkan Kabupaten Banyuwangi mempunyai biaya pendidikan paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain.

Danumihardja (2004:177) menyatakan bahwa sekolah swasta dan negeri, apabila didukung biaya, sarana dan prasarana, serta guru yang kinerja baik akan memperoleh hasil yang baik pula. Teori *cost effectiveness* untuk sekolah swasta hampir seluruh biaya pendidikan dibiayai orang tua siswa. Ada kecenderungan adanya keterkaitan antara level biaya dengan mutu lulusan yaitu semakin tinggi satuan biaya per siswa, maka hasil Nilai Ebtanas Murni (NEM) makin tinggi/baik. Hal ini terbukti bahwa Kabupaten Gresik pengeluaran baik biaya langsung dan biaya pendidikan paling tinggi, mendapatkan

hasil Ujian Nasional (UN) 2007 paling baik di Provinsi Jawa Timur. Surya (2007) menyatakan prestasi lima besar ditempati secara berturut-turut Kabupaten Gresik (24,37), Kabupaten Lamongan (24,19), Kabupaten Tulungagung (24,09), Kabupaten Pamekasan (23,93) dan terakhir Kabupaten Sidoarjo (23,88). Dari data ini, prestasi pendidikan Kota Surabaya pada tahun 2007 mengalami kemunduran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komponen pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh siswa SMAN berdasar geoekonomi di Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi biaya pendidikan langsung dan biaya pendidikan tak langsung. Biaya pokok studi (biaya langsung) yaitu biaya yang dikeluarkan oleh siswa untuk pengeluaran pendidikan, baik yang dikeluarkan untuk sekolah maupun biaya yang dikeluarkan untuk keperluan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Biaya hidup (biaya tak langsung) adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan itu terjadi di sekolah.

Besarnya biaya pendidikan yang dikeluarkan individu/pribadi/keluarga siswa SMAN di Jawa Timur per tahun untuk biaya langsung \pm Rp 7.726.667,00 dan biaya tak langsung \pm Rp 3.213.333,00. Biaya pendidikan (*expenditure*) = \pm Rp 10.940.000,00/th. Sedangkan biaya siswa dalam menempuh pendidikan menengah dalam jangka waktu selama 3 tahun, untuk biaya langsung berjumlah \pm Rp 23.180.000,00 dan biaya tak langsung \pm Rp 9.640.000,00 sehingga biaya pendidikan atau *expenditure* = \pm Rp 32.820.000,00. Terbukti ada perbedaan yang signifikan pembiayaan pendidikan siswa SMAN berdasarkan geoekonomi di Provinsi Jawa Timur. Biaya pendidikan tertinggi di wilayah Gresik, Batu, Surabaya, dan Banyuwangi.

Saran

Kepada siswa agar lebih bijaksana mempergunakan biaya pendidikan, mengingat biaya langsung tidak dapat dielakkan, sehingga biaya tak langsung dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin. Bagi orangtua hendaknya mulai sekarang untuk menyisihkan pendapatan (menabung/asuransi pendidikan) untuk mempersiapkan biaya bagi putra

putrinya untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah hendaknya pengambilan keputusan untuk menentukan besarnya pungutan yang dikenakan setiap siswa secara bijaksana. Pejabat Departemen Pendidikan Nasional di Jawa Timur, hendaknya memberikan patokan dalam hal pembiayaan pendidikan seperti uang pangkal/pungutan lain supaya sekolah tidak seenaknya mengadakan penarikan uang di luar yang sudah ditentukan dan memberikan subsidi kepada siswa SMAN yang pandai tetapi ekonomi keluarga kurang.

DAFTAR RUJUKAN

- Burrup, P.E., Brimley, V. dan Garfield, R.R. 1993. *Financing Education in A Climate of Change*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Danumihardja, M. 2004. *Manajemen Keuangan Sekolah: Studi Manajemen Keuangan pada SLTP dalam Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Uhamka Press.
- Darmaningtyas. 2005. *Inefisiensi, Biang Mahalnya Pendidikan*. (Online), (<http://www.kompas.com>), diakses 13 September 2005.
- Dikdasmen Depdiknas, 2006. *Mahalnya Biaya Pendidikan*, (Online), (<http://www.depdiknas.go.id>), diakses 13 Desember 2006.
- Engel, J.F, Blackwell, R.D, dan Miniard, P.W. 1987. *Perilaku Konsumen* (alih bahasa F.X. Budiayanto). Janarta: Binarupa Aksara.
- Fattah, N. 2002. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Gihartik. 2004. *Analisis Perbedaan Expenditure Mahasiswa Program Sarjana (Strata-1) Regular Perguruan Tinggi Negeri di Kota Malang* (Skripsi). Malang: Tidak diterbitkan.
- Jawa Post. 2004. *Biaya Pendidikan*, (Online), (<http://www.jawapost.com>), diakses 30 Desember 2004.
- Kompas. 21 Maret 2005. *Kemiskinan dan Putus Sekolah*, (Online), (<http://www.kompas.com>), diakses 13 Desember 2006.
- Kompas. 29 Oktober, 2004. *Biaya Pendidikan Lebih Banyak Ditanggung Orang Tua Siswa*, hlm.13.
- Reksohadiprodjo, S. 1985. *Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Soediharto, T. 2001. *Perilaku Konsumen*. Malang: Jurusan Manajemen UM.
- Sumardi, M. dan Evers, H.D. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali.
- Sunny. 2007. *Kemiskinan di Banyuwangi*, (Online), (<http://www.balipost.co.id>), diakses 10 Juli 2007.
- Supriyadi, D. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi.D. 2000. *Ilusi Pendidikan Gratis*, (Online), (<http://www.ambon>), diakses 12 Agustus 2005.
- Surya, M. 2004. *Pendidikan Murah, Mungkinkah?* (Online), (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0704/14/08.htm>), diakses 30 Desember 2004.
- Surya. 2007. *Menyoal Jebloknya Pendidikan Kota Surabaya*. (Online), (<http://www.surya.com>), diakses 10 Juli 2007.
- UU No. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta: Durat Bahagia.